

Lembaga Filantropi dan Fiskal Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Negara

Puput Triani¹, Santika Dewi², Parij Niamullah³, Mohammad Ridwan⁴

puputtriani70@gmail.com¹, santikadewii2003@gmail.com², pariijniam@gmail.com³,
mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id⁴.

Pogram Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Alamat : Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153
Korespondensi Penulis : puputtriani70@gmail.com

Abstract. *Economic development is the main goal that every country wants to achieve to improve people's welfare, reduce poverty, and encourage sustainable economic growth. This study examines the important role of philanthropic institutions and fiscal policy in encouraging economic development, both in general and from an Islamic economic perspective. Philanthropy, through voluntary contributions such as zakat, infaq, alms, and waqf, helps fill gaps that cannot be fully addressed by the public sector, improves people's welfare, and reduces socio-economic disparities. Fiscal policy, as the main tool of government, plays an important role in managing state revenues and expenditures, influencing economic growth, income distribution, and macroeconomic stability. Through in-depth literature analysis, this research finds synergies between the philanthropic sector and fiscal policy that can strengthen sustainable economic development. This study also provides insight into the development of Islamic economics in the last three decades, showing significant progress in academic research and operational practice. It is hoped that the results of this research can provide significant policy recommendations to maximize the potential of these two tools in achieving fair and sustainable economic development.*

Key words: *economic development, philanthropy and economic growth*

Abstrak. Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Studi ini mengkaji peran penting lembaga filantropi dan kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan ekonomi, baik secara umum maupun dalam perspektif ekonomi Islam. Filantropi, melalui kontribusi sukarela seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, membantu mengisi kesenjangan yang tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh sektor publik, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Kebijakan fiskal, sebagai alat utama pemerintah, memainkan peran penting dalam mengelola pendapatan dan belanja negara, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas makro ekonomi. Melalui analisis literatur yang mendalam, penelitian ini menemukan sinergi antara sektor filantropi dan kebijakan fiskal yang dapat memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Studi ini juga memberikan wawasan tentang perkembangan ekonomi Islam dalam tiga dekade terakhir, menunjukkan kemajuan signifikan dalam penelitian akademis dan praktik operasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang signifikan untuk memaksimalkan potensi kedua alat ini dalam mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: pembangunan ekonomi, filantropi dan pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan terpenting yang ingin dicapai oleh setiap negara, sehingga diperlukan berbagai perangkat yang baik dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di antara berbagai instrumen tersebut, lembaga amal dan kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Lembaga-lembaga filantropi ini, yang beroperasi di luar pemerintah, memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya keuangan dan dukungan teknis untuk proyek dan proyek sosial. ekonomi Melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, lembaga filantropi membantu mengisi kesenjangan yang tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh sektor publik. Kontribusi mereka sering kali didorong oleh semangat altruistik dan keinginan untuk memberikan dampak yang benar-benar positif terhadap kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, kebijakan fiskal adalah alat terpenting yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Dengan mengelola pendapatan dan belanja pemerintah, kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas makroekonomi. Instrumen fiskal seperti pajak, subsidi, dan belanja pemerintah dapat digunakan untuk mendorong investasi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menyalurkan sumber daya ke sektor-sektor strategis pembangunan untuk secara efektif mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Setelah peran dan kontribusi keduanya dipahami, harapannya adalah menemukan strategi optimal untuk memaksimalkan potensi kedua alat ini. Studi ini melihat contoh spesifik dari berbagai negara, mengidentifikasi tantangan ke depan dan membuat rekomendasi kebijakan yang signifikan. Melalui analisa mendalam tersebut diharapkan dapat ditemukan sinergi antara sektor filantropi dan kebijakan fiskal yang dapat memperkuat pembangunan ekonomi. Kerjasama yang erat antara negara dan lembaga amal diharapkan dapat menciptakan program yang lebih efektif dan berkelanjutan serta memberikan dampak sosial yang lebih luas.

METODE

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni metode pengumpulan informasi dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari literatur ilmiah. Sumber digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari dan menyusunnya dari berbagai sumber seperti buku,

majalah dan penelitian yang telah dilakukan. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kritis dan harus komprehensif untuk mendukung usulan dan gagasan.

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pembangunan Ekonomi dalam pengembangan filantropi islam serta pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal diindonesia, Sehingga metode penelitian ini dianalisis berdasarkan sumber data yang diperoleh dari beberapa referensi yang ada dalam penelitian ini . Teknik pengumpulan data diterapkan dengan tinjauan pustaka menggunakan sumber akademis, jurnal ilmiah dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Filantropi dan fiskal

Filantropi berasal dari bahasa Yunani *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia (Latief, 2010). Filantropi merupakan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain (Bawaqi, 2019). Pengertian filantropi secara lebih luas adalah kesadaran untuk memberi dan menolong yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Fungsi dari berdirinya lembaga filantropi adalah meningkatkan kesejahteraan hidup para penerima manfaatnya dalam jangka panjang dan berkelanjutan, artinya implementasi program yang disalurkan tidak hanya berhenti untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat saja (Sholikhah, 2021).

Filantropi adalah suatu tindakan dimana individu atau kelompok memberikan dukungan finansial, waktu, atau sumber daya lainnya untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, atau lingkungan, Tujuan filantropi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat. Karakteristik filantropi termasuk niat baik dan keinginan untuk membantu orang lain. Selain itu, filantropi biasanya dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan materi. Dan filantropi juga berarti memahami dan menyadari masalah yang dihadapi masyarakat dan berusaha untuk menyelesaikannya.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menghasilkan perubahan sosial yang positif adalah tujuan utama dari filantropi. Ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti memberikan donasi ke lembaga amal dan mendukung mereka. program pendidikan, kesehatan, atau lingkungan, atau berpartisipasi dalam aktivitas sukarela untuk membantu orang yang membutuhkan. Selain itu, filantropi dapat berfungsi sebagai landasan teoritis untuk pembuatan

kebijakan sosial atau program pemerintah. Prinsip-prinsip seperti keinginan untuk membantu, kesetaraan, dan keadilan sosial dapat menjadi dasar program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, atau memperkuat komunitas yang rentan.

Filantropi umumnya mengacu pada sumbangan pribadi oleh individu, perusahaan, dan yayasan untuk tujuan publik dan mencakup berbagai kegiatan. Penelitian filantropi mempunyai tradisi panjang sejak teori pemberian kompetitif, yang mana pemberian disajikan sebagai kasus altruisme, egoisme, dan timbal balik. Banyak penelitian di bidang antropologi, ekonomi, biologi evolusioner, dan psikologi terus berfokus pada penekanan motivasi para aktor dalam kerangka dan ruang lingkup filantropi. Meskipun para sosiolog telah memasuki studi filantropi baru-baru ini, mereka tetap memberikan kontribusi penting bagi pemahamannya dengan menarik perhatian pada basis sosial filantropi. Para sosiolog telah melakukan hal tersebut melalui studi tentang faktor-faktor tingkat mikro, meso, dan makro yang menjelaskan variasi dalam filantropi; spesifikasi pengaturan kelembagaan dan hukum yang mengizinkan filantropi; dan penggambaran konteks sosial yang membentuk arah dan konsekuensi filantropi (Khudzaifah Dimiyati et al., 2023).

kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (Edi Irawan, 2023).

Salah satu faktor kunci, selain dampak pengeluaran pemerintah pada produksi, adalah konsistensi kebijakan fiskal dengan perubahan siklus bisnis ekonomi. Pada dasarnya, kebijakan fiskal diharapkan berfungsi sebagai penyesuaian otomatis dalam dinamika perekonomian. Dengan kata lain, ketika ekonomi sedang mengalami pertumbuhan, pengeluaran pemerintah seharusnya cenderung menurun atau pendapatan pajak meningkat. Sebaliknya, pada periode kontraksi ekonomi, kebijakan fiskal diharapkan bersifat ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan pendapatan pajak. Oleh karena itu, kebijakan fiskal berperan sebagai alat pengendali otomatis dalam mengelola perubahan ekonomi yang berarti bahwa kebijakan tersebut harus berfungsi secara kontracyclical, yaitu berlawanan arah dengan pergerakan siklus bisnis. Dengan menggunakan instrumen fiskal yang tepat, pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi fluktuasi yang berlebihan dalam perekonomian (Nurhayana¹ & Soebagiyo, 2023).

B. Peran kebijakan fiskal dalam mengendalikan perubahan ekonomi

Kebijakan fiskal merupakan suatu bentuk tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran dan pajak atau menggunakan instrumen fiskal untuk mempengaruhi jalannya sistem perekonomian sehingga kesejahteraan perekonomian dapat maksimal. Secara umum, kebijakan fiskal diartikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah dengan tujuan mempengaruhi perekonomian, misalnya melalui tindakan yang melibatkan pemerintah. Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam membentuk kegiatan perekonomian suatu negara, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan. Namun pengaruh kebijakan keuangan terhadap aktivitas perekonomian suatu negara sangat besar. Berbagai indikator perekonomian lainnya juga mengalami perubahan akibat penerapan kebijakan keuangan pemerintah. Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi harus selalu positif, sedangkan dampaknya terhadap inflasi harus selalu negatif. Namun secara teoritis, kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan meningkatkan belanja masyarakat tanpa menambah sumber pajak, yang merupakan sumber utama keuangan pemerintah, akan menyebabkan defisit anggaran (Luluk Masrufah, 2022). Kebijakan fiskal idealnya berfungsi sebagai automatic stabilizer perekonomian, artinya kebijakan fiskal harus bersifat countercyclical (Shandy et al., 2024).

C. Tujuan Kebijakan Fiskal di Dalam Perspektif Islam

Di dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal adalah mendukung tujuan dari ditegakkannya sistem ekonomi Islam dan tujuan dari kebijakan ekonomi Islam di dalam suatu perekonomian. Secara garis besar tujuan kebijakan ekonomi di dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

Pertama, tujuan pokok dan utama kebijakan ekonomi adalah untuk mendukung Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat negara dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia serta melindungi negara dan bangsa dari serangan musuh.

Kedua, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang mempunyai peranan penting untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonomi, serta memenuhi kewajiban negara, antara lain; menjamin kesejahteraan perekonomian bangsa dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup setiap orang, menerapkan disiplin

dan manajemen terhadap kesejahteraan perekonomian negara, termasuk memperkuat peran lembaga Hisbah dalam perekonomian.

Ketiga, tujuan politik ekonomi lainnya berasal dari optimalisasi penggunaan sumber daya finansial, serta sumber daya manusia dan material. Keempat, menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, seperti iklim investasi yang kondusif, meningkatkan tabungan dan akumulasi modal untuk pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan peluang yang menguntungkan bagi kegiatan perekonomian karena harus mendukung keempat tujuan kebijakan ekonomi tersebut di atas, khususnya kebijakan fiskal. Tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selaras dengan optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi, baik sumber daya manusia maupun keuangan, sumber daya manusia alam dan material.
2. Untuk mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata dalam perekonomian tanpa kesenjangan ekonomi yang besar.
3. Kami mengendalikan adanya siklus volatilitas tinggi dalam perekonomian yang dapat berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan menyebabkan penderitaan karenanya.
4. Melindungi nilai-nilai Islam dan memenuhi standar Islam dengan melakukan tindakan preventif terhadap praktik-praktik terlarang, Syariah, seperti transaksi keuangan yang berdasarkan bunga dan menunjang kegiatan perekonomian dipandang perlu diprioritaskan, begitu pula sebaliknya.
5. Penyimpanan pembayaran luar negeri. Jika melihat tujuan kebijakan fiskal di atas, kita menemukan bahwa dua poin pertama merupakan komponen penting pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, sedangkan tiga poin terakhir merupakan komponen yang berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan ekonomi. Dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi harus mampu menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam perekonomian. Salah satu cara yang diterapkan dalam kebijakan fiskal adalah transfer, yaitu pengenaan pajak. Misalnya, pajak regresif cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan, sedangkan, misalnya, pajak progresif cenderung meningkatkan kesetaraan atau menurunkan kesenjangan atau ketimpangan kekayaan dan pendapatan. Pajak progresif ini tampaknya sejalan dengan kebijakan perpajakan ekonomi Islam yang menekankan pada redistribusi pendapatan yang adil dan proporsional, kata M. Umar

Chapra. Pajak progresif, yang dilengkapi dengan pajak barang, merupakan salah satu langkah fiskal yang paling efektif untuk mengatasi tekanan inflasi dalam perekonomian (Cahyasari, 2019).

D. Perkembangan Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kemiskinan karena kemiskinan merupakan salah satu sebab dari upaya pembangunan ekonomi. Islam memandu pengentasan kemiskinan dan fokus sosialekonomi sebagai komitmen untuk sungguh-sungguh berusaha, bekerja, sebagai komitmen untuk memberi sedekah, membelanjakan, memberi infaq dan wakaf. Penyaluran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf merupakan salah satu cara untuk meredam kesenjangan dan perbedaan di masyarakat sehingga tidak terjadi ketegangan dan kerawanan sosial di masyarakat. Dengan menyebarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan umat, terutama yang berhak, sehingga menjadi berharga dan layak, mandiri tanpa bantuan dari orang lain (Suharno, 2022).

Pilantropi dan fiskal memiliki kaitan dengan perkembangan pembangunan ekonomi Islam. Diantaranya ialah:

1. Pilantropi dalam Konteks Ekonomi Islam: Pilantropi merujuk pada praktik memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang kurang beruntung. Dalam Islam, pilantropi dikenal dengan istilah "zakat" yang merupakan salah satu dari lima pilar Islam, zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan.

Pemberian zakat memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Zakat juga berfungsi untuk meningkatkan solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, zakat dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mengatur alokasi dan distribusi keuangan negara.

Sebagai contoh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah Indonesia menunjukkan kebijakan fiskal. APBN menetapkan alokasi dan distribusi

uang negara untuk mendukung pembangunan ekonomi. Ekonomi dapat berkembang, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan fiskal yang tepat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada yang membutuhkan. ini dapat dicapai dengan mengatur penggunaan dana publik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk manajemen zakat dan dana amal lainnya(Supangat, 2013).

Dengan demikian, filantropi dan kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam perkembangan pembangunan ekonomi Islam. Filantropi, melalui praktik zakat, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sementara kebijakan fiskal yang berpihak kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Ekonomi islam dalam tiga dekade terakhir mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam penelitian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Pada dasarnya pemikiran ekonomi islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah ekonomi Islam di dunia Islam. Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia belum secepat seperti di negara-negara lain. Secara sederhana, perkembangan tersebut dapat dibedakan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan.

Sementara itu, istilah pembangunan ekonomi (economic development) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sehingga sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai "economic development is growth plus change" (Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi). Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ekonom bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan(Fitria, 2016).

(Sukirno 1999) Dalam perencanaan ekonomi sederhana, pertumbuhan ekonomi mengacu pada pertumbuhan keuangan publik di suatu negara, termasuk peningkatan kuantitas dan produksi produk manufaktur, perbaikan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, pembuatan rencana ekonomi yang ada dan perkembangan terkait lainnya. Jika kita analisis,

konsep di atas menunjukkan bahwa prioritas utama pertumbuhan ekonomi adalah mengubah arah pembangunan ekonomi menjadi ekonomi industri, di mana produktivitas meningkat secara maksimal. Oleh karena itu, akumulasi cadangan devisa negara dan peran individu diklasifikasikan sebagai indikator pertumbuhan yang "fundamental"(Nasution et al., 2023).

KESIMPULAN

Filantropi dan kebijakan fiskal adalah dua konsep penting yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, baik dalam konteks umum maupun dalam perspektif ekonomi Islam. Berikut adalah kesimpulan utama dari pembahasan tersebut:

Filantropi

➤ **Pengertian dan Tujuan:**

- Filantropi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta kepada sesama manusia dan mencakup tindakan sukarela memberikan waktu, uang, dan tenaga untuk membantu orang lain.
- Tujuan utama filantropi adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan.

➤ **Peran dalam Pembangunan Ekonomi:**

- Filantropi mendukung lembaga-lembaga amal, program pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
- Dalam konteks ekonomi Islam, filantropi diwujudkan melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan umum.

Kebijakan Fiskal

➤ **Pengertian dan Fungsi:**

- Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik.
- Fungsi utama kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah dan pajak.

➤ **Peran dalam Pembangunan Ekonomi:**

- Kebijakan fiskal yang efektif dapat bertindak sebagai penyeimbang otomatis terhadap perubahan siklus bisnis ekonomi, yang dikenal sebagai countercyclical.
- Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus mendukung prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada yang membutuhkan.

Perkembangan Pembangunan Ekonomi Islam

➤ Kemajuan Ekonomi Islam:

- Ekonomi Islam telah mengalami kemajuan signifikan dalam tiga dekade terakhir, baik dalam penelitian akademis maupun dalam praktek operasional.
- Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menekankan pada distribusi pendapatan yang adil, pengurangan kesenjangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

➤ Implementasi Filantropi dan Kebijakan Fiskal:

- Filantropi dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, dan wakaf berperan penting dalam mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.
- Kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dapat memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, filantropi dan kebijakan fiskal saling melengkapi dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kedua konsep ini, jika diimplementasikan dengan tepat, dapat membantu mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik di dalam konteks umum maupun dalam kerangka ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyasari, D. (2019). *Modul mata kuliah: kebijakan fiskal*.

Edi Irawan. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 01–08. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1898>

Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>

- Khudzaifah Dimiyati, S. H., Setiaji, B., & Kelik Wardiono, S. H. (2023). *Hukum dan lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63–71. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/jmcbus/article/view/484/466>
- Nurhayana¹, E., & Soebagiyo, D. (2023). Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 106–119. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4578>
- Shandy, A., Perbankan, P., Fakultas, S., Islam, A., Muhammadiyah, U., Utara, S., Sihombing, D. A., Perbankan, P., Fakultas, S., Islam, A., Muhammadiyah, U., Utara, S., Siregar, P. A., Perbankan, P., Fakultas, S., Islam, A., Muhammadiyah, U., Utara, S., Juniar, S., ... Utara, S. (2024). *Analisis Kebijakan Ekonomi Moneter Dan Fiskal Dalam Pengendalian Inflasi Di Indonesia*. 9(1).
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 27–42. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>
- Suharno, M. I. (2022). PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM OLEH YBM BRILIAN: PROGRAM ZAKAT DAN WAKAF ATM BERAS DI MASJID RAYA STABAT. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(2), 194–208.
- Supangat, S. (2013). Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 91–106. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.781>